

BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Proses Collaborative Governance dalam Mitigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk Sei Pulai Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada *collabotive governance* dalam mitigasi pengelolaan sumber daya air Waduk Sei Pulai, dapat disimpulkan bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan optimal dan berpihak pada mitigasi pengelolaan SDA Waduk Sei Pulai Kepulauan Riau. Kurang optimalnya *collaborative governance* dalam mitigasi pengelolaan SDA Waduk Sei Pulai dapat terlihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Memutuskan Sebuah Isu Dalam Kolaborasi (Deciding On a Fitting Issue for Collaboration)

Adanya keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta jaringan merupakan isu dilakukannya kolaborasi. Dalam berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan air, isu lebih diutamakan pada pengelolaan sumber daya air yang lebih besar Bagi Kepri. Isu bagi pengelolaan SDA Waduk Sei Pulai belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan maupun program yang tertuang dalam Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Kepri. Sebab prioritas lebih mengarah pada menghadirkan waduk baru sebagai sumber air.

2. Menentukan Karakteristik Masalah Melalui Pertanyaan “What and Where” (Characterizing The Issue by What and Where Inquires).

Karakteristik masalah yang terjadi pada Waduk Sei Pulai tidak teridentifikasi secara jelas, meskipun ada banyak persoalan yang mengelilinginya. Misalnya, apa saja yang harus dilakukan guna penyelamatan waduk, apa yang harus dibangun untuk melindungi waduk, hal apa yang menjadi kendala selama ini, dimana titik prioritasnya, dan seterusnya. Penentuan karakteristik masalah hanya mengedepankan masalah yang terdapat dalam Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Kepri, namun belum ada program yang akan dijalankan. Termasuk bagi mitigasi pengelolaan Waduk Sei Pulai.

3. Mencari Tahu Siapa Saja Yang Terlibat (Finding Out Who is Involved).

Stakeholder yang terlibat dalam TKPSDA WS Kepri terdiri dari 24 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Namun, *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kewenangan paling besar yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Mencari Tahu Bagaimana Mengimplementasikannya (Finding Out How to Implement)

Untuk mengimplementasikannya dilakukan pengambilan keputusan dalam forum TKPSDA WS Kepri melalui mekanisme dan pembahasan bersama yaitu pada sidang komisi dan sidang pleno. Dialog yang dilakukan diantara berbagai aktor dalam rangka implementasi tidak secara spesifik membahas terkait mitigasi pengelolaan SDA Waduk Sei Pulai. Dialog juga belum menyentuh kepada masyarakat yang menempati kawasan hutan dan terlibat dalam pengrusakan hutan serta pihak perusahaan sawit. Orientasi pembahasan lebih bersifat global dan belum mengarah secara spesifik serta rinci khususnya program bagi Waduk Sei Pulai.

5. Mencari Tahu Bagaimana Menyelenggarakannya (Finding Out How to Launching Implementation)

Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan air. Upaya perlindungan sumber daya air masih mengalami permasalahan, dan butuh tindakan bersama. Penetapan awal yang bisa dihasilkan TKPSDA WS Kepri, bahwa stakeholder telah secara sepakat dan bersama-sama menentukan program-program sementara yang akan dibahas selanjutnya. Program yang telah tertuang dalam Matriks Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kepulauan Riau merupakan bentuk *intermediate outcome*. Pada prinsipnya upaya mitigasi pengelolaan SDA di Kepri mulai terlihat, namun belum bisa dipastikan dan belum spesifik pada program untuk mitigasi pengelolaan SDA Waduk Sei Pulai.

6. Mencari Tahu Bagaimana Mengevaluasi Proses (Finding Out How to Evaluating the Process)

Proses kolaborasi yang telah dilakukan belum mampu memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap organisasi maupun anggota. Namun TKPSDA WS telah meminta kepada setiap anggota tetap mengambil peran sesuai kapasitasnya untuk memikirkan program-program yang akan disinkronisasi untuk dilaksanakan. Seluruh anggota diminta untuk tetap menjalin komunikasi dan koordinasi di luar forum TKPSDA WS agar komunikasi yang intens tersebut dapat mempercepat sinkronisasi program.

1.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Mitigasi Pengelolaan Waduk Sei Pulai Provinsi Kepulauan Riau

Faktor-faktor yang menjadi pendukung Collaborative Governance Dalam Mitigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk Sei Pulai di Kepulauan Riau adalah:

1. Faktor Budaya:

Terdapat keinginan untuk saling bekerjasama dan mematuhi aturan dalam menjalankan rangkaian proses kolaborasi. Begitu juga dengan persepsi stakeholder dalam memandang stakeholder lainnya sebagai bagian dari upaya mencaai solusi. Keberpihakan pada masing-masing kelompok menjadikan kualitas kolaborasi menjadi efektif.

Adapun faktor yang menjadi penghambat Collaborative Governance Dalam Mitigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk Sei Pulai di Kepulauan Riau adalah:

1. Faktor Institusi:

Masih terdapat ego sektoral dalam menyikapi persoalan SDA Waduk Sei Pulai. Struktur hirarkis menjadikan mekanisme pertanggungjawaban dan penetapan sangat prosedural dan membutuhkan waktu lama.

2. Faktor Politik:

Secara politik, konsistensi pemerintah untuk menentukan program-program bagi pemenuhan kebutuhan air di Kepri akan berdampak pada legitimasi. Matriks sementara yang dihasilkan terindikasi minim inovasi bagi mitigasi pengelolaan Waduk Sei Pulai. Sangat disayangkan jika sumber air yang ada seperti Waduk Sei Pulai diabaikan dalam pengelolaannya dan terjadi semacam pembiaran.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal bagi Collaborative Governance Dalam Mitigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk Sei Pulai di Kepulauan Riau:

1. Program-program inovatif bagi mitigasi pengelolaan Waduk Sei Pulai harus segera ditentukan demi menyelamatkan waduk saat ini dan dimasa mendatang.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan Tanjungpinang harus diberi penguatan anggaran dan sarana serta bertindak tegas, bertanggungjawab dalam menjaga serta membenahi kawasan hutan lindung Sei Pulai.
3. Kejelasan asset Waduk Sei Pulai harus segera diselesaikan agar program yang akan dilakukan BWSS IV dapat dilanjutkan.
4. Penting juga melibatkan stakeholder lain yang memiliki keterkaitan bagi upaya penyelamatan Waduk Sei Pulai seperti Biro Perekonomian Setda Prov Kepri, Balai Pengelolaan Daerah Sungai (BP DAS), Badan Pertanahan Kepri/Kota Tanjungpinang/Bintan, Kepolisian, Satpol PP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PT. Tirta Madu, PT. Bintan Alumina Indonesia, dan masyarakat yang menetap di kawasan hutan lindung Sei Pulai.
5. Mekanisme dan pembahasan melalui sidang komisi dan sidang pleno hendaknya dijalankan dalam tempo yang tidak terlalu panjang, agar program dapat segera diimplementasikan.

6. Program yang tertuang di dalam Matriks Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kepulauan Riau hendaknya di sajikan secara detail dan spesifik.
7. Perlu dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) ketika pembagian tugas dan tanggung jawab telah di tentukan.